



Buletin

Parlementaria

Nomor 974/V/VIII/2017 • Agustus 2017

72TH
INDONESIA
KERJA
BERSAMA



**DPR Dorong Peningkatan
Nilai Perdagangan Indonesia Vietnam**

**DPR Pastikan
Revisi UU KPK**

**Timwas Haji
Temukan Praktik
Rentenir di Mekkah**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



Timwas Haji menggelar konferensi pers di Media Center

Timwas Haji Temukan Praktik Rentenir di Mekkah

Tim Pengawas Haji DPR RI diketuai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan tugas pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan haji di Mekkah dan Madinah, pada 18–24 Agustus 2017 lalu. Timwas mendapat informasi yang mengagetkan, yakni adanya praktik rentenir dalam penukaran uang riyal.

Fadli menjelaskan bahwa setiap jamaah mendapat biaya hidup (living cost) sebesar 1500 riyal dalam pecahan 500 riyal. Namun ketika ditukarkan dengan pecahan kecil, mereka dipotong 80 riyal. Kejadian ini dilaporkan oleh jemaah di pemondokan hotel Al Lu'lu'a Shisyah, Aziziyah, Mekkah.

“Praktik ini terjadi di embarkasi dan ada juga di bandara, dan dilaporkan oleh banyak jamaah di pemondokan mereka di hotel Al Lu'lu'a Shisyah, Aziziyah. Dimana ada 7 kloter di hotel ini,” kata Fadli, langsung dari Arab Saudi, Selasa (22/8) waktu setempat.

Fadli menambahkan, pihaknya

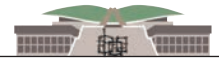
menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan haji tahun ini. Pemondokan dan catering jadi catatan penting sorotan Timwas. Sementara dalam pertemuan dadakan dengan sejumlah jamaah sebanyak 15 kloter, Timwas mendapat masukan terkait perbaikan pelaksanaan haji.

“Ada yang mengeluh karena kejauhan, ada soal makanan yang kurang rasa Indonesiannya, ada juga yang memberi masukan soal tas identitas jamaah haji yang berkualitas rendah, mudah robek dan jebol,” imbuh Fadli.

Saat mengunjungi Daerah Kerja

Madinah, Timwas melihat langsung Kantor Daker, pemondokan dan tempat catering yang bermasalah. Salah satu dapur catering sempat menyajikan 6400 paket makanan yang basi. Akhirnya, makanan basi tersebut ditarik dan diganti dengan yang baru. Akibatnya, jamaah haji Indonesia telat makan malam.

“Kami mengunjungi dapur dan pengelola catering tersebut dan mengingatkan agar hal tersebut tak boleh terjadi lagi. Kondisi perusahaannya kurang layak. Seharusnya perusahaan ini tidak diberikan deal yang besar, karena perusahaan catering ini ternyata masih



baru, tidak besar, dan kurang profesional. Kalau terjadi lagi menyuplai makanan basi, sebaiknya perusahaan ini di-black list saja,” tegas Fadli, dalam konferensi pers di Media Center DPR, Kamis (24/8), sepulangnya dari tanah suci.

Tim juga melihat langsung lokasi pemondokan yang kurang layak dan jauh dari Masjid Nabawi, kurang lebih 1200 meter. Pemondokan yang jauh itu menyulitkan akses bagi jamaah bila ingin bepergian atau beribadah ke pusat Kota Madinah. Ketika Timwas meninjau pemondokan tersebut, ternyata masih kurang layak bagi jamaah haji Indonesia.

Sementara saat di Mekkah, Timwas sidak ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Di sana, Timwas menemukan banyak jamaah yang dirawat dari penyakit ringan seperti flu, batuk, dan pilek, hingga penyakit berat seperti jantung, stroke, dan kanker.

“Ada unit gawat darurat, rawat inap, ICU hingga rawat gangguan kejiwaan. Tim dokter dan petugas kesehatan bekerja dengan baik walaupun tenaga medis masih kurang,” imbuh politisi F-Gerindra itu.

Namun, bila melihat secara umum, menurut Fadli, pelayanan haji tahun ini sudah meningkat. Tinggal memperbaiki sisi kekurangan yang masih menjadi sorotan. Pada bagian lain, Fadli menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun transisi dalam penyelenggaraan haji. Tahun depan, penyelenggaraan haji sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Sementara bicara kuota haji, Fadli mendesak pemerintah melakukan lobi intensif agar kuota haji Indonesia terus bertambah. Tahun ini, kuotanya tetap 211 ribu plus 10 ribu orang calon haji. Tambahan kuota 10 ribu diberikan pemerintah Arab

Saudi kepada semua negara, bukan hanya Indonesia. Tahun lalu sempat dikurangi, karena ada proyek perluasan Masjidil Haram.

“Pemerintah harus melakukan lobi yang intensif di Organisasi Kerjasama Islam (OKI), karena di situ kuota ditentukan. Antrian calon haji Indonesia juga semakin panjang,” ungkap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Dua Pimpinan Komisi VIII juga hadir dalam konpers ini, masing-masing Sodik Mudjahid dan Iskan Qolba Lubis. Menurut Sodik, masih ada catatan-catatan kecil dalam penyelenggaraan haji kali ini. Misalnya, petugas haji Indonesia lemah berkoordinasi, rumah makan masih jauh dari jangkauan jamaah, dan mutu catering kurang baik.

“Masih ada kelemahan perencanaan. Misalnya, maktab yang jauh. Dan yang paling jauh adalah pada hari jelang haji atau muthawaf ifadhoh, dimana jemputan sudah dihentikan,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

Sementara itu, Iskan melihat daya tawar penyelenggara haji Indonesia sangat lemah. Kalah dalam bernegosiasi dengan negara lain, sehingga perlu dianalisa. Politisi PKS ini mencontohkan, berdasarkan kesepakatan Kemenag dan Komisi VIII, jamaah Indonesia 100 persen harus berada di markaziyah atau ring 1.

“Tiba-tiba digeser begitu saja oleh jamaah Iran. Akhirnya, ada 18 persen tidak masuk ring satu. Akibatnya, jamaah Indonesia mendapat fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh juga sarana gedung banyak yang rusak. Padahal, bayar biayanya sama. Di Indonesia mesti ada kementerian haji yang lepas dari Kemenag. Di negara lain ada kementerian haji. Nilah yang membuat daya tawarnya kuat,” jelas Iskan. ■

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

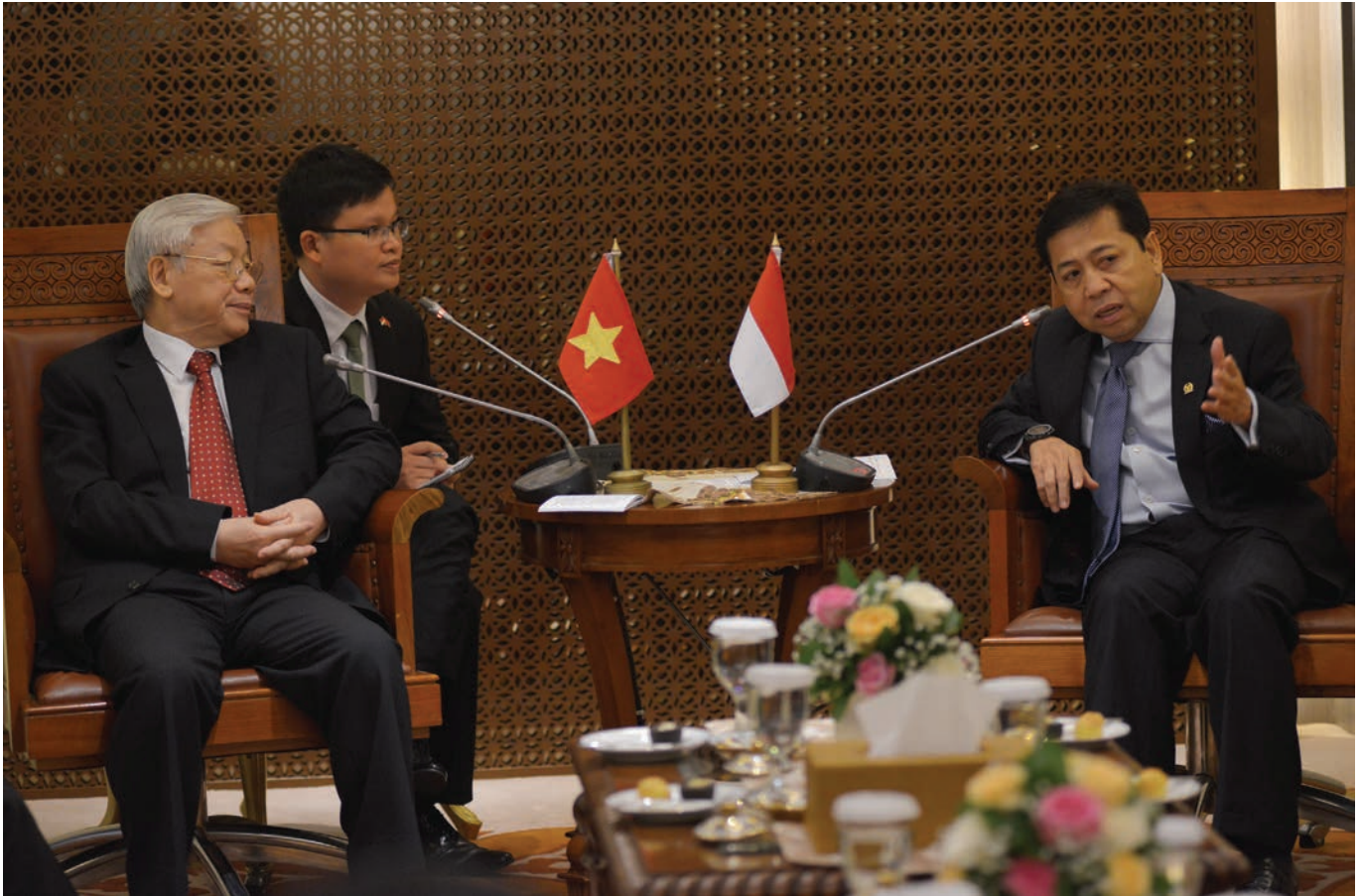


foto: istimewa

Tim Penerbitan melaksanakan kunjungan ke PT. Angkasa Pura II, Bandara Soeta dalam rangka evaluasi dan peninjauan penempatan Rak Display Majalah dan Buletin Parlemenaria pada Terminal III, di terima oleh Branch Communications Manager, Dewandono Prasetyo Nugroho

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)
ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong.

DPR Dorong Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia – Vietnam

Dewan Perwakilan Rakyat RI memberikan dukungan atas usaha Pemerintah Indonesia dan Vietnam yang sepakat menaikkan nilai perdagangan kedua negara secara bertahap dari US\$ 6,3 miliar pada tahun 2016, menjadi US\$ 10 miliar pada tahun 2018.

Untuk mewujudkan hal itu, diharapkan Indonesia dan Vietnam sama-sama memacu semua kementerian maupun komunitas badan usaha di kedua negara agar aktif menjalin pertukaran informasi serta promosi investasi dan konektivitas badan usaha. Sehingga bisa mengoptimalkan berbagai potensi peluang kerjasama.

Demikian dikatakan Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (Sekjen PKV) Nguyen Phu Trong, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Dalam pertemuan itu, Novanto didampingi Wakil Ketua Komisi I

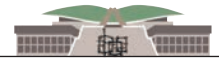
DPR RI Meutya Hafid; Ketua BURT DPR RI Anton Sihombing; Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi; serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi.

Sementara Nguyen Phu Trong datang ke DPR RI didampingi sejumlah menteri, antara lain Minister of Industry and Trade Tran Tuan Anh, Minister of Agriculture and Rural Development Nguyen XuanCuong, Deputy Prime Minister of Foreign Affairs Pham Binh Minh. Sebelum datang ke DPR RI, Nguyen Phu Trong dan rombongan sudah diterima Pimpinan MPR RI, dan kemudian juga akan diterima DPD RI dan Presiden Joko Widodo.

"Saya mengapresiasi pemerintah

Vietnam yang terus berusaha menciptakan suasana kondusif di dalam negerinya sehingga memberikan kemudahan bagi badan usaha Indonesia memperkuat investasi di Vietnam. Seiring dengan itu, sebagai Ketua DPR RI saya memberikan jaminan kepada Vietnam bahwa stabilitas politik dan ekonomi kita juga terjaga dengan baik. DPR RI bersama Pemerintah Indonesia terus bekerjasama meningkatkan iklim investasi. Para investor Vietnam tidak perlu takut datang ke Indonesia," papar Novanto.

Secara khusus, Novanto juga meminta kepada Nguyen Phu Trong agar kunjungan ini bisa dijadikan momentum bagi penyelesaian batas Zona Ekonomi



Ekstusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam yang sudah dibahas sejak tahun 2010 dan belum ada penyelesaian hingga kini. Penyelesaian ZEE sangat penting untuk menegaskan batas maritim antara Indonesia dengan Vietnam.

Politisi F-PG itu menambahkan, kunjungan ini merupakan rangkaian resmi kunjungan kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang sudah dibangun sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1955. Dalam pergaulan internasional, Indonesia membuka diri dengan berbagai negara, termasuk Vietnam yang juga merupakan bagian dari komunitas ASEAN.

“Saya harap masyarakat Indonesia tidak terhasut oleh pihak-pihak yang berusaha membuat fitnah dan propaganda di berbagai media sosial, yang mencampuradukan kunjungan ini dengan masalah ideologi politik yang dianut Vietnam,” tegas Novanto

Masih dalam kesempatan yang sama, politisi asal dapil NTT itu juga mengundang Parlemen Vietnam untuk menghadiri acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diselenggarakan oleh DPR RI pada 6-7 September 2017 di Bali, Indonesia.

Sementara itu, Nguyen Phu Trong mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi Vietnam, Indonesia adalah negara besar yang tidak hanya berpengaruh di kawasan ASEAN, melainkan juga di kawasan lainnya, bahkan sampai ke Uni Eropa. Karena itu, Vietnam menganggap Indonesia sebagai mitra penting dalam menggali berbagai potensi kerjasama di berbagai bidang.

Nguyen Phu Trong menjelaskan, dengan jumlah penduduk 92,7 juta jiwa, Vietnam menjadi pasar terbesar ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6 persen. Pertumbuhan kelas menengah disana juga pesat. Ini potensi bagi Indonesia menanamkan investasi dan meningkatkan nilai perdagangan dengan Vietnam.

Sebagaimana diketahui, kondisi politik di Vietnam menganut sistem mono partai. PKV adalah entitas politik tertinggi, sehingga Sekjen PKV menjadi bagian integral dari eksistensi negara Vietnam. Oleh sebab itu, Sekjen PKV memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi, melampaui Presiden dan Perdana Menteri Vietnam. ■

(sf), Foto: Jakarta/hr

Parlemen Uni Eropa akan Hadir dalam World Parliamentary Forum

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Parlemen Uni Eropa untuk Asean Fransisco Fontan Pardo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Pertemuan ini membahas beberapa hal terkait dengan hubungan Uni Eropa – Asean, khususnya tentang Sustainable Development Goals (Pembangunan Berkelanjutan), yang mana akan dibahas secara komprehensif dalam World Parliamentary Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada 6-7 September mendatang.

“Ini sangat penting dan urgen karena kita membahas tentang agenda pertemuan antar parlemen di Bali. Salah satu agendanya adalah regional cooperation antara Asean dan Uni Eropa sehingga menjadi penting untuk menghadirkan beliau,” ungkap politisi dari F-Demokrat ini.

Nurhayati menjelaskan, kehadiran Uni Eropa sangat penting dalam World Parliamentary Forum ini karena akan membahas lebih lanjut mengenai resolusi sawit. Sebab, menurutnya, Uni Eropa selalu memperlakukan sustainable palm oil dan isu ini dibawa pada forum tersebut. Sebagaimana diketahui, Resolusi tersebut menuduh kelapa sawit sebagai pemicu deforestasi.

“Untuk apa, supaya mereka melihat komitmen Indonesia terhadap agenda 2030 yang sudah dimulai sejak era SBY akan terus dilanjutkan dan komitmen kita didukung parlemen (DPR RI),” terangnya.

Untuk diketahui, World Parliamentary Forum adalah forum pertama antar parlemen sedunia yang merupakan inisiatif DPR RI untuk membahas berbagai isu global, terutama tentang Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s). Disebutkan Nurhayati, sebanyak 45 negara yang sudah mengkonfirmasi akan hadir dalam forum internasional tersebut.

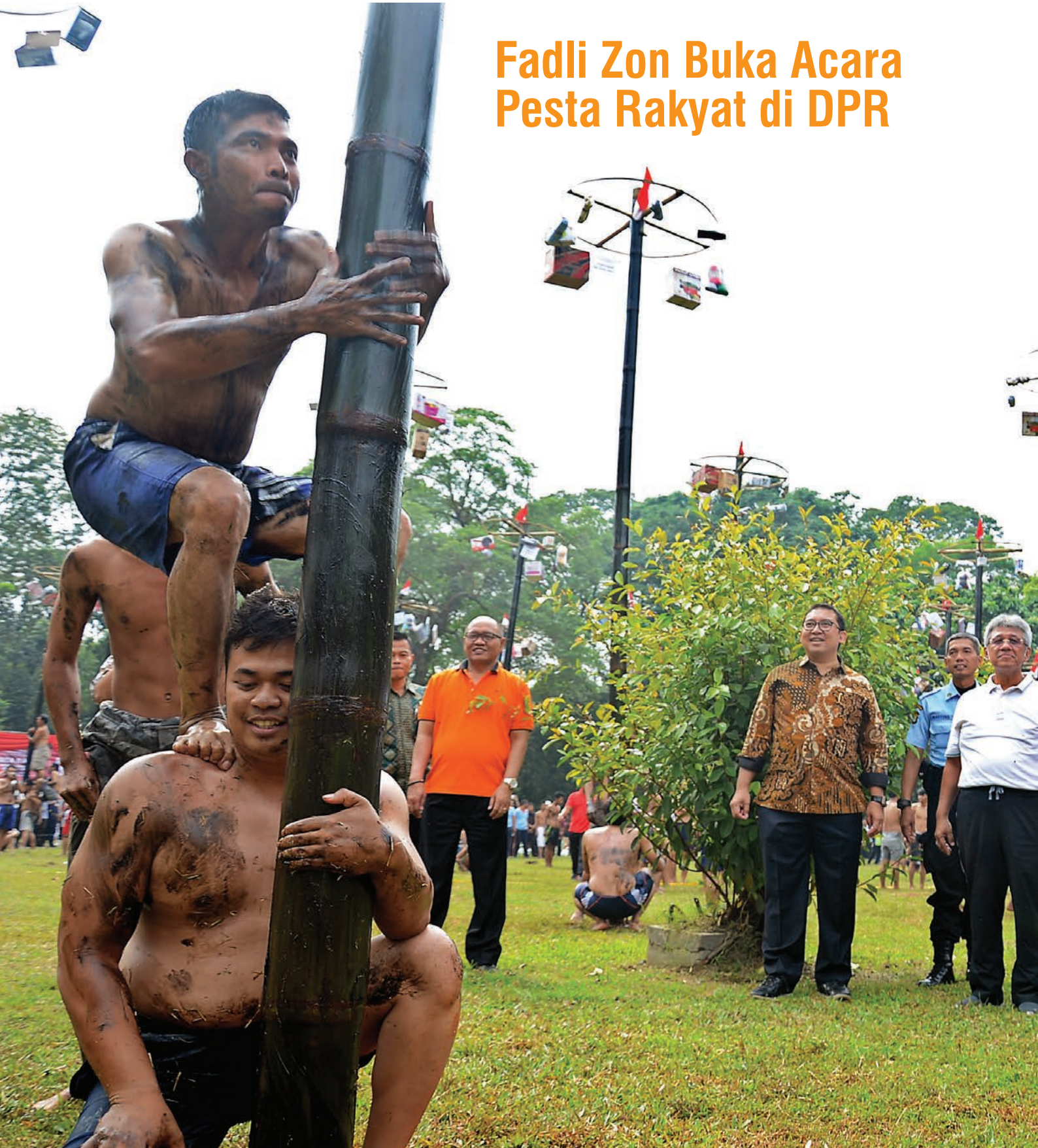
“Forum ini sangat diapresiasi oleh PBB, dan akan sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai,” tandas Nurhayati. ■

(ann), Foto: Azka/hr



Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf bersama Duta Besar Parlemen Uni Eropa untuk Asean Fransisco Fontan Pardo.

Fadli Zon Buka Acara Pesta Rakyat di DPR





Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Sekjen DPR Achmad Djuned dan Kepala BKD Johnson Rajagukguk membuka Pesta Rakyat Panjat Bambu Betung.

Memperingati ulang tahun Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ke 72, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membuka Pesta Rakyat Panjat Bambu Betung. Dia menyampaikan pesta rakyat ini dalam rangka memeriahkan 72 tahun Indonesia merdeka.

“Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 72, dirgahayu DPR RI yang ke 72. Dengan mengucapkan ‘Bismillahirohman nirrohman,’ pesta rakyat panjat bambu betung saya buka. Terimakasih,” ujar Fadli di lapangan Komplek Parlemen, Jumat (18/8).

Pada pesta rakyat ini, tidak menggunakan pinang seperti biasanya, namun menggunakan bambu betung. Menurut Fadli, ini dalam rangka merawat lingkungan, karena pohon pinang memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh, pohon pinang setinggi satu meter memerlukan waktu tiga tahun, sedangkan bambu betung relatif lebih cepat.

Sebelum acara dibuka, Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned melaporkan, pesta rakyat ini diikuti oleh 72 tim panjat bambu betung. “Pesertanya dari seluruh wilayah Jabodetabek, jadi tidak hanya diikuti oleh pegawai di lingkungan sekretariat jenderal DPR, MPR dan DPD. Tetapi juga seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek,” papar Djuned.

Dia menyampaikan, kegiatan pesta rakyat kali ini adalah kegiatan ketiga yang dilakukan oleh DPR, dan yang lebih unik lagi biasanya panjat pinang, tapi khusus untuk DPR ini adalah panjat bambu betung yang diinisiasi oleh Bapak Fadli Zon,” ungkap Djuned.

Sebelum acara pesta rakyat dibuka, digelar acara rutin senam pegawai Setjen DPR, MPR dan DPD. Acara ini juga dimeriahkan oleh band dari Korpri DPR RI. ■

(eko.mp), Foto: Rumihr

Sikap Tidak Proporsional Wasit Ganggu Prestasi Atlet

Mundurinya Timnas sepak takraw putri Indonesia pada set kedua dari arena pertandingan saat menghadapi Malaysia pada SEA Games 2017 di Titiwangsa Indoor Stadium Kuala Lumpur, Malaysia, disebabkan kepemimpinan wasit asal Singapura, yang dinilai banyak merugikan Timnas Indonesia.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa jangan sampai penyelenggaraan acara Sea Games dinodai oleh sikap ketidak proporsional wasit, yang dapat mengganggu prestasi para atlet yang ikut bertanding.

“Kalau penyelenggaraannya jelek, tidak proporsional dan tidak bersikap adil, maka menyebabkan para atlet putus asa dan tidak bisa mengeluarkan prestasi yang sesungguhnya,” tandas Fikri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (21/8).

Fikri mengatakan, kalau memang merasa bahwa ada ketidak

proporsional dan bersifat merugikan pihak Indonesia pada saat pertandingan, maka semestinya hal itu tidak hanya dilakukan oleh cabang sepak takraw, tetapi harus juga diikuti dengan cabang-cabang olah raga lainnya yang merasa dicurangi.

“Ini harus menjadi pelajaran bagi kita jelang acara yang lebih besar dan lebih tinggi yakni Asian Games, agar jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Masalah Profesionalitas wasit atau juri jangan sampai merugikan sebuah negara,” pungkasnya. ■

(dep.mp), Foto: Arief/hr

Hetifah Sesalkan Dana Desa Tidak Naik di RAPBN 2018

Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Ini tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah. Dalam RAPBN 2018, Dana Desa direncanakan sebesar Rp 60 triliun, sama seperti tahun 2017.

Menanggapi Dana Desa yang tidak ada penambahan di tahun 2018, anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudien menyayangkan kebijakan penganggaran pemerintah. Sebelumnya pemerintah beberapa kali menyatakan akan menambah Dana Desa, bahkan melipatgandakan di 2018. Muncul dugaan bahwa Dana Desa yang rawan dikorupsi menjadikan pemerintah membatalkan kenaikan.

“Saya sesalkan Dana Desa tidak naik, karena komitmen pemerintah sejak awal adalah membangun dari desa. Kerawanan penyalahgunaan Dana Desa sesungguhnya tidak perlu membuat komitmen ini surut,” kata Hetifah, Rabu (23/8).



Anggota Banggar DPR RI, Hetifah Sjaifudien

Politisi Golkar itu menyebutkan bahwa kerawanan korupsi Dana Desa bisa diantisipasi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk koordinasi lintas kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Yang penting bagaimana kita meningkatkan kapasitas penanggung jawab, pelaksana, bahkan penerima

manfaat. Juga mengintensifkan pengawasan dan membuka saluran pengaduan. Yang terakhir tingkatkan koordinasi lintas kementerian dan berbagai level pemerintahan,” jelas Hetifah.

Meski dalam RAPBN 2018 pemerintah tidak menaikkan Dana Desa, anggota DPR RI dari Kaltim-Kaltara ini akan mengusulkan penambahan pada rapat

rapat pembahasan RAPBN 2018.

“Dalam pembahasan nanti di Banggar DPR RI kita akan mengusulkan agar Dana Desa ditingkatkan,” katanya.

Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 761,0 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 701,0 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun. ■

(ns/sc), Foto: Runt/hr

Anggota Pansus Arteria Dahlan mengemukakan, kehadiran Syarifuddin pada rapat Pansus, Senin (21/8), ingin mencari keadilan. Ada rekayasa kasus dalam perkara Syarifuddin yang ketika itu sedang menangani kasus pailit PT. Skycamping Indonesia pada 2011. KPK melakukan OTT, karena Syarifuddin menerima suap dari kurator Puguh Wirawan sebesar Rp250 juta.

“Kita sangat apresiasi ada seorang hakim pemberi keadilan datang ke DPR untuk mencari keadilan. Ini adalah bukti yang sempurna dan faktual bahwa keberadaan Pansus ini memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Luar biasa seorang pemberi keadilan datangnya ke Pansus DPR RI. Ini membuat semangat dan tambahan energi buat Pansus agar bekerja lebih objektif dan lebih transparan, sehingga hasilnya bisa diterima oleh masyarakat banyak,” tegas Arteria.

Politisi PDI Perjuangan ini, semakin yakin bahwa memang benar ada dugaan penyidikan sesat yang dilakukan para penyidik KPK. Ia melihat, sejak awal kasus Syarifuddin disidik KPK, ada dugaan rekayasa dan ada pemodal di balik kasus mantan hakim tersebut, sehingga harus dilakukan OTT.

“Luar biasa, bukti-bukti dipenggal, direkayasa, dan sekaligus dilakukan pembusukan dan pembunuhan karakter. Dilakukan pula pembentukan opini publik, sehingga menutup kebenaran atas fakta hukum itu sendiri. Ini yang kita coba ungkap dan paparkan kepada publik bahwa penegakan hukum harus humanis, berkepastian, dan adil. Negara pun tidak gaduh seperti ini,” ucap Arteria usai mendengarkan kesaksian Syarifuddin di rapat pansus.

Dijelaskan Arteria, mantan hakim Syarifuddin sebetulnya ingin



Anggota Pansus KPK DPR RI, Arteria Dahlan

Pansus Apresiasi Kesaksian Mantan Hakim Syarifuddin Umar

Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengapresiasi kesaksian mantan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar. Kesaksian ini sekali lagi membuktikan adanya dugaan penyidikan sesat yang dilakukan penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Syarifuddin Umar.

melindungi 3.200 buruh perusahaan yang sedang dipailitkan itu. Waktu itu, Syarifuddin ingin membatalkan akta jual beli dan kemudian dilakukan lelang secara tunai, agar uangnya bisa dibagikan kepada para buruh. Tapi, kata Arteria, hakim Syarifuddin malah dikriminalisasi. Padahal, ia melakukannya sesuai hukum. Akhirnya, hingga kini para buruh tidak mendapatkan hak-haknya.

“Saya katakan, fakta ini membuka

mata kita bahwa DPR-lah yang memperjuangkan buruh dan rakyat, bukan KPK,” tandas Arteria. Pada bagian lain, ia juga mendesak adanya audit berita acara sita yang dilakukan KPK. Berapa banyak dokumen yang disita dan tidak dilaporkan. Pihaknya juga mendesak audit finansial dalam konteks OTT. Seberapa banyak yang dilaporkan KPK dari hasil OTT dari perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. ■

(mh,mp), Foto: Runt/hr

Tudingan Pertemuan Penyidik KPK dengan Komisi III Harus Dibawa ke Ranah Hukum

Tudingan adanya tujuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertemu dengan Anggota Komisi III DPR RI dan permintaan uang pengamanan sebesar Rp 2 miliar, harus segera dibawa ke ranah hukum. Bahkan, permasalahan itu tidak cukup diselesaikan di ranah komite etik internal KPK saja.

“Dalam UU KPK sangat jelas diatur. Jika benar ada penyidik menemui pihak-pihak terkait perkara dalam penanganan perkara, tindakan tersebut adalah pidana. Setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 UU KPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun,” tegas Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dalam keterangan persnya yang diterima Parlemen, Senin (21/8).

Politisi F-PG itu menegaskan bahwa ini merupakan persoalan hukum yang serius, serta menyangkut integritas DPR dan KPK. Ini bukan delik aduan, sehingga Polri harus segera melakukan penyelidikan dan memeriksa para pihak yang mengungkapkan hal itu dalam rekaman di pengadilan.

“Apakah itu fakta atau hanya rekayasa tanpa fakta hukum yang hanya bertujuan untuk menarget pihak-pihak tertentu. Pemeriksaan bisa dimulai dari pemutaran rekaman secara utuh tanpa potongan atau editan dan pengecekan soal keaslian rekaman tersebut di Labotarium Forensik Mabes Polri. Dari situ nanti akan jelas

tergambar siapa bicara apa, dan dalam nada apa,” tegas Bambang.

Paralel dengan itu, Polri juga bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Pertama terhadap Miryam S. Haryani, sebagai orang yang menyebut nama Anggota Komisi III yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK dan meminta uang pengamanan Rp 2 miliar.

“Berikutnya, dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang memeriksa Miryam untuk mengkonfirmasi isi rekaman CCTV tersebut karena banyak kalimat-kalimat tidak jelas dan mutu rekaman jelek. Apakah nama-nama itu keluar dari mulut Miryam atau keluar dari mulut penyidik,” kata Bambang, seolah bertanya.

Berikutnya, Polri harus memanggil dan segera memeriksa anggota Komisi III DPR yang mengaku bertemu dengan tujuh penyidik KPK dan melakukan konfrontasi dengan penyidik KPK yang dituding bertemu dan meminta uang pengamanan Rp 2 miliar tersebut.

Dan yang terakhir, masih kata Bambang, Polri harus segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan tersebut ke publik, sehingga diketahui kebenaran dari



Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo

tudingan itu. Jika tudingan itu tidak benar dan fitnah, Polri harus meningkatkannya ke penyidikan. Baik terhadap Miryam, termasuk kepada anggota DPR yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK maupun penyidik yang memeriksa Miryam karena adanya dugaan rekayasa dan kesaksian palsu di pengadilan.

“Jika tudingan itu benar, maka Polri harus meningkatkan status saksi terhadap anggota Komisi III DPR dan tujuh penyidik dan pegawai KPK tersebut menjadi tersangka dan dilanjutkan proses hukumnya ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Bambang.

Namun Bambang meragukan tudingan adanya tujuh penyidik KPK menemui anggota Komisi III. Pasalnya, itu hanyalah pengakuan sepihak dengan mengutip ucapan pihak lain dan belum menjadi bukti hukum.

“Apa yang disampaikan Miryam dalam rekaman tersebut, bukanlah sesuatu yang dialami, dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh dirinya sebagai saksi,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(sif/sc), Foto: Andri/hr

Dalam Jalankan Fungsinya, KPK Tak Berpedoman pada KUHAP

Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan. Didapatkan berbagai praktik tekanan, ancaman bujukan dan janji-janji.

Demikian antara lain laporan Pansus Hak Angket KPK yang dibacakan anggotanya Mukhammad Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/8). Sejak efektif bekerja 4 Juli hingga pertengahan Agustus 2017 ini Pansus yang diketuai Agun Gunanjar telah melakukan serangkaian kegiatan diantaranya menerima pengaduan berbagai profesi, kunjungan ke Kejagung dan Polri serta Lapas Sukamiskin mendapatkan beberapa temuan.

Bahkan lanjutnya, didapatkan dalam pelaksanaan fungsinya,

Pemerintah Harus Satu Suara Tentang Kasus Calon Jemaah Haji Risti

Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI menemukan adanya pro-kontra rencana keberangkatan calon jemaah haji pria asal Maluku Utara dari Embarkasi Makassar, penderita sakit gagal ginjal yang termasuk dalam calon jemaah haji resiko tinggi atau Risti. Hal itu terungkap saat Panja mengunjungi Embarkasi Sudiang, Makassar, Senin (22/8).

“Tadi dipaparkan ada sebuah kasus calon jemaah haji beresiko tinggi, yakni penderita gagal ginjal berusia 49 tahun asal Maluku yang menempuh berbagai cara (sampai obudsmen) untuk tetap bisa diberangkatkan ibadah haji ke tanah suci,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri, sekaligus Ketua Tim Panja Kesehatan Haji Komisi IX ke Makassar.

Pada kesempatan itu, Panja melihat adanya dualisme keputusan dari pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Dinas Kesehatan Haji dari Kementerian Kesehatan dengan merujuk pada Permenkes No.15 tahun 2016, penderita sakit gagal ginjal termasuk dalam salah satu calon jemaah haji penyakit beresiko tinggi (risti) yang tidak bisa diberangkatkan ke tanah suci. Mengingat penderita harus menjalani cuci darah setiap tiga hari sekali dalam setiap minggunya.

Sementara Panitia Perjalanan Ibadah Haji dari Kementerian Agama Republik



Tim Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI mengunjungi Embarkasi Sudiang, Makassar.

Indonesia tetap merekomendasikan calon jemaah haji Risti ini untuk tetap bisa diberangkatkan beribadah haji ke tanah suci dengan alasan kemanusiaan. Pasalnya, saat pendaftaran haji pria tersebut belum terkena penyakit tersebut, dan ia pun sudah menunggu antrian daftar tunggu haji hingga bertahun-tahun, sangat tidak manusiawi ketika kesempatan itu datang tapi pemerintah tidak membolehkannya alias melarangnya. Terkait penyakit yang diderita calon jemaah haji tersebut, Kemenag meyakini

bahwa usia seseorang ada di tangan Illahi. Pihak keluarga dan calon jemaah haji yang bersangkutan pun sudah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut apa-apa kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji jika terjadi sesuatu kejadian terburuk dengan calon jemaah haji Risti tadi. Hingga kini calon jemaah haji tersebut masih berupaya dengan berbagai cara untuk tetap bisa diberangkatkan beribadah haji ke tanah suci.

“Dualisme keputusan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Pemerintah baik dinas kesehatan maupun panitia perjalanan ibadah haji Kementerian Agama harus satu suara terkait kasus seperti ini. Oleh karena itu ke depan kami akan kembali membahas hal ini kepada pemerintah pusat mengenai batasan-batasan dan perkecualian sebuah kasus calon jemaah haji Risti. Jangan sampai pemerintah daerah atau Panitia Perjalanan Ibadah Haji di daerah mengalami kebingungan. Dalam hal ini pemerintah harus satu suara,” pungkas Syamsul.

Hal tersebut pun diamini oleh seluruh tim delegasi Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI yang ikut mengunjungi Embarkasi Sudiang, Makassar seperti Elva Hartati, Anshory Siregar, Ayub Khan, Marwan Dasopang, Alya Mustika Ilham, Irgan Chairul Mahfiz, Sri Wulan, dan Frans Agung Mula putra. ■

(Ayuh), Foto: Ayu/hr



Pimpinan dan Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR berfoto bersama, usai melakukan konferensi pers di Press Room Wartawan DPR.

KPK melakukan kegiatan yang membahayakan fisik dan nyawa. Pencabutan BAP di persidangan, kesaksian palsu yang direkayasa, hal itu terjadi dan didapatkan Pansus Angket. “Karena itu ke depan hal-hal itu perlu perbaikan,” ungkap Misbakhun.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan eksistensi, jati diri, kehormatan, dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara penegak hukum. KPK dinilai lebih mengedepankan praktik penindakan melalui pemberitaan

(opini) dari pada politik pencegahan.

Sedangkan dalam fungsi supervisi, KPK lebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi, di banding dengan upaya mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi kepolisian dan kejaksaan. “KPK cenderung ingin menjadi lembaga yang tidak hanya di pusat tapi ingin mengembangkan jaringan sampai ke daerah. Yang sesungguhnya KPK dibentuk lebih pada fungsi koordinasi dan supervisi, adapun penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan lebih pada fungsi berikutnya (trigger mechanism),” jelasnya. ■

(mp), Foto: Rumi/hr



Tim Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR berdialog dengan para calon Jamaah Haji di Embarkasi Banda Aceh.

Panja Kesehatan Haji Komisi IX Soroti Bus Tanpa Toilet

Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI menyoroti bus penjemputan calon jamaah haji tanpa toilet. Pasalnya, jamaah calon haji yang hendak berangkat dan jamaah haji yang sudah pulang ke tanah air, bus penjemputannya tidak dilengkapi dengan toilet.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan pemangku kebijakan terkait pemantauan pelayanan kesehatan para calon jamaah haji di Embarkasi Aceh, Senin (21/8).

Dede menilai, dengan waktu tunggu di dalam bus mencapai dua jam, maka menahan buang air kecil akan berpengaruh bagi kesehatan jamaah haji. Karena bus penjemputan jamaah



haji merupakan tanggungjawab Garuda Indonesia, maka hasil temuan ini nanti Panja Kesehatan Haji Komisi IX akan berkoordinasi dengan Tim Pengawas Haji dimana didalamnya ada juga Komisi V DPR untuk menegur manajemen Garuda Indonesia yang menyediakan bus-bus tanpa toilet itu. "Karena alokasi anggaran transportasi ini cukup besar," jelasnya.

Lebih jauh Dede mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan bagi jamaah haji masih dilakukan di tenda-tenda. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sempat mengusulkan membangun rumah sakit untuk memudahkan memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji.

"Kebijakan Kerajaan Arab Saudi tidak mengizinkan negara lain membangun rumah sakit di negaranya. Hal yang memungkinkan dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan rumah sakit setempat. "Inilah yang sedang kita jajaki," kata Dede.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap, pelayanan kesehatan jamaah haji Indonesia akan lebih baik di masa mendatang. Panja Kesehatan Haji Komisi IX selain meninjau ke Embarkasi Aceh juga meninjau ke Embarkasi Makassar dan Surabaya dengan waktu yang sama. Peninjauan ini dilakukan karena ketiga daerah ini memiliki jumlah pemberangkatan haji yang besar dan lamanya daftar tunggu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengungkapkan, saat ini Pemerintah Aceh sedang mencari skema untuk memperbaiki asrama haji, karena kondisi asrama haji yang sudah tua. selain itu pembangunan gedung baru juga terkesan tidak terintegrasi dengan baik perencanaan dan perancangannya, sehingga kurang ideal bagi asrama haji modern.

Terkait dengan bus angkutan jamaah haji, Wagub berjanji akan menggelar pertemuan dengan pihak terkait, yaitu Kemenag, Kemenhub, dan Garuda Indonesia untuk menyediakan angkutan yang mewah kepada para jamaah haji.

"Nanti teknisnya akan kita tindaklanjuti, mungkin kita bisa menyediakan angkutan yang mewah untuk para jamaah haji. Jika tidak sedang musim haji, kendaraan tersebut bisa kita komersilkan untuk angkutan pariwisata premium. tapi nanti skemanya kita akan bicarakan lebih lanjut," pungkasnya. ■

(Iw.mp), Foto: Iwan/hr

Kuota Tenaga Kesehatan Jamaah Haji Perlu Ditambah



Tim Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI meninjau Asrama Haji Sukolilo di Surabaya, Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mendesak pemerintah untuk menambah kuota tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jamaah haji. Pasalnya, berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, jamaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi setiap tahun terus meningkat.

“Tahun 2017 ini, jamaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi (risti) mencapai 65 persen, satu kloter yang berangkat itu 450 peserta sementara tenaga kesehatannya hanya satu dokter dan dua perawat, itu sangat sangat kurang,” ungkap Ermalena usai meninjau Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/8).

Semakin meningkatnya jamaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi, menurut Ermalena perlu didukung permintaan Kementerian Kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada setiap calon jamaah yang mau diberangkatkan sebagai upaya preventif.

“Kami menyarankan deteksi dini dilakukan begitu seseorang ditetapkan sebagai calon jamaah haji, diberikan buku catatan kesehatan agar kesehatan peserta haji dapat termonitor dan tertangani dengan baik,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani yang menegaskan pentingnya penambahan tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jamaah haji, disaat meningkatnya jamaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi.

“Kami akan terus meminta pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jamaah haji yang ingin berangkat,” tegasnya. Selain pendampingan tenaga kesehatan, politisi partai Nasdem ini juga meminta Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPHI) untuk menyampaikan aturan maupun tata cara dalam menjalankan ibadah haji.

“Mereka harus memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji baik dalam menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Karena banyak ditemukan jamaah haji yang tidak bisa menggunakan toilet di sana. Memang sepele tetapi ini penting, toilet yang kotor kan juga sumber penyakit” jelasnya.

Yang menjadi sorotan Irma lainnya yaitu mengenai catering untuk jamaah haji yang sering kali basi. Irma meminta pemerintah untuk membuat sanksi tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

“Dengan cuaca ekstrem di sana mereka kan butuh asupan makan, kalau basi bagaimana, kan kasihan. Harus ada sanksi tegas agar mereka jera, sanksi tegas ya bukan sanksi administrasi,” pungkasnya mengingatkan. ■

(Iria.mp), Foto: Ria/hr



Korban penganiayaan pencuri sarang burung walet memeragakan penyiksaan oleh oknum Polres Bengkulu

Kasus Penganiayaan Pencuri Sarang Burung Walet Diserahkan ke Komisi III

Pansus Hak Angket KPK menerima aspirasi dari para korban kasus penganiayaan dan penembakan pencuri sarang burung walet yang dituduhkan kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan, Senin (21/8). Kasus tersebut terjadi saat Novel masih bertugas di Polres Bengkulu tahun 2004. Di akhir rapat, setelah menerima aduan dan keluhan dari para korban penganiayaan, Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa menyimpulkan, menyerahkan kasus tersebut kepada Komisi III.

Dengan disaksikan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Agun menyampaikan, "Kami memutuskan bahwa laporan aspirasi saudara diterima Pansus, dengan keputusan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III untuk menindaklanjuti dengan mengundang Jaksa Agung untuk didorong kepada proses peradilan, setuju ya?" tanya Agun kepada anggota rapat, lalu dijawab "setuju" palu pun diketuk.

Bagi Pansus, meskipun tindakan Novel dalam rangka penegakan hukum, namun harus tetap menjunjung Hak Asasi Manusia, proses investigasi tidak boleh membabi buta dengan menganiaya para pelaku pencurian. Adapun para pencuri pencurian burung walet yang dianiaya yakni Irwansyah Siregar, Ali, Doni, dan Dedi Nuryadi yang mengaku tak bersalah. Mereka ditemani oleh kuasa hukumnya, Yuliswan.

Saat rapat, Dedi bersumpah tidak bersalah atas kasus pencurian. Dedi menceritakan saat dirinya disiksa hingga disetrum kemaluannya di Polres Bengkulu. "Sesampainya di Polres langsung dibuka baju, langsung pakai sempak. Digiling sepeda motor, dibawa ke ruangan, dibuka celana dalam dan disetrum kemaluan saya sampai lumpuh," ujar Dedi sambil terisak.

Para korban juga sempat memeragakan penyiksaan oleh oknum Polres Bengkulu saat itu, yang dilakukan di Pantai Panjang Bengkulu. Mereka mengaku telah disetrum, dilindas sepeda motor, dan ditembak. Dedi menceritakan, ia dan kelima orang lainnya disuruh menghadap ke belakang dan ditembak kakinya. "Lalu kami dari belakang, ada enam orang yang ditembak," imbuh Dedi. ■

(eko.rmp), Foto: Rumi/Inf

Pilkada Serentak Terancam Persoalan E-KTP

Pilkada serentak yang dihelat pada 2018 terancam oleh persoalan E-KTP yang belum tuntas. Pasalnya, kapasitas *software* untuk merekam data pemilih sangat terbatas, hanya mampu merekam 170 juta data pemilih. KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi soal ini.

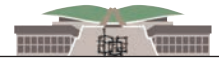
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengungkapkan persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Bawaslu dan KPU, Rabu (23/8). Sepeninggal Johannes

Marliem saksi kunci kasus E-KTP di KPK, *software* alat rekam kependudukan belum jelas penyelesaiannya. Padahal, ini penting untuk menyukseskan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Kita sampaikan, ada persoalan lain



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy



yang me-*warning* Kemendagri berkenaan dengan akan berhentinya perekaman data penduduk, yaitu persoalan internal E-KTP. Ada Johannes Marliem yang meninggal. Kemudian ada tagihan kepada Indonesia yang tidak bisa dibayar. Ada juga persoalan teknis bahwa perekaman itu ada batasnya. Kita khawatir begitu software yang dibuat ini tidak bisa merekam lagi, apa antisipasinya. Ini menyangkut jutaan pemilih yang tidak bisa direkam,” katanya kepada pers usai rapat.

Ditambahkan Lukman, bila software tidak bisa berfungsi lagi, maka anak-anak yang akan berusia 17 tahun di bulan Agustus ini, dipastikan tidak bisa direkam. Padahal,

mereka yang sudah berusia 17 tahun akan masuk daftar pemilih untuk Pilkada serentak 2018. Apalagi, UU Pilkada Pasal 200A mengamanatkan pada akhir 2018, basis data pemilih harus sudah menggunakan E-KTP. Tidak berlaku lagi surat keterangan untuk memilih.

“Soal E-KTP dalam UU Pilkada Pasal 200A jelas mengatakan, akhir Desember 2018, 100 persen harus sudah menggunakan data kependudukan berdasarkan E-KTP. Tidak menerima bentuk surat keterangan kependudukan yang lain. Karena ini Pilkada terakhir, maka peraturan KPU dan peraturan Bawaslu harus mendorong pada progres penerapan 100 persen E-KTP itu,” harap politisi PKB tersebut.

Pada bagian lain, Lukman juga mempersoalkan transisi kelembagaan Bawaslu di semua tingkatan. Dalam UU Pemilu ada perubahan eksistensi kelembagaan Bawaslu pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Rekrutmen keanggotaan Bawaslu juga belum jelas. Ini jadi isu penting yang dikritisi para anggota Komisi II.

Kelembagaan dan kewenangan Bawaslu sudah berubah. Bawaslu perlu menyusun road map berkenaan dengan masa transisi ini menuju mekanisme kelembagaan yang baru. Sebelum Pilkada 2018, persoalan ini harus sudah jelas tergambar, karena Pilkada serentak tinggal beberapa bulan lagi. ■

(mh,mp), Foto: Andri/hr

Pembangunan Infrastruktur Diharapkan Terus Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena berharap pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo terus ditingkatkan sesuai dengan janji-janji kampanyenya pada 2014 lalu. Peralnya, masih ada daerah yang dijanjikan dibangun jalur kereta api, namun hingga saat ini belum ada langkah konkrit dari pemerintah.

“Contohnya masyarakat Papua dan Papua Barat yang dijanjikan terkait dengan pembangunan kereta api, sampai saat ini belum ada langkah konkrit pembangunannya,” kata Michael, usai mendengar Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Tetapi, tambah politisi F-PD itu, apapun yang terjadi di usia Bangsa Indonesia ke 72 dan usia 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ia tetap memberikan apresiasi. Ia pun berharap, apa yang telah dicapai saat ini, dapat lebih ditingkatkan lagi.

Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang lagi Jawanisasi, atau Sumatranisasi. Dampaknya saat ini, sebanyak 70 persen industri itu ada di Pulau Jawa dan 20 persen di Sumatera. Sementara sisanya baru di Indoensia Timur. Untuk itu, ia berharap pembangunan difokuskan di Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Kalau bisa, ini dikonkritkan dengan pembangunan yang real sifatnya. Supaya

faedah dan manfaatnya itu betul-betul dirasakan masyarakat, sehingga keadilan dan pemerataan itu dapat dirasakan masyarakat bukan hanya di Jawa atau Sumatera, tapi diseluruh pelosok wilayah Indonesia. Khususnya di Maluku, Papua, Papua Barat, NTT dan Indonesia Timur lainnya,” harapnya.

Di sisi lain, Michael berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada sektor penerimaan negara. Peralnya, masyarakat sudah mulai gelisah dengan eksploitasi pajak yang begitu dahsyat dan masif yang dilakukan di dalam negeri. Menurutnya, hal ini jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam membangun investasi dalam negeri.

“Saat ini banyak pengusaha dan investor itu sudah mulai gelisah terkait dengan pungutan pajak, dalam rangka memenuhi kebutuhan APBN. Ini harus ada semacam kreasi supaya tidak dibebankan kepada pelaku usaha di dalam negeri. Supaya iklim investasi yang diharapkan pemerintah betul-betul dapat tercapai, dan tercipta iklim investasi yang kondusif,” harap politisi asal dapil Papua Barat itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo



Wakil Ketua Komisi V DPR, Michael Wattimena

memaparkan, pada periode 2015-2016, pemerintah telah berhasil membangun jalan dan peningkatan kapasitas jalan lebu kurang sepanjang 7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan empat bandara baru, serta pembangunan jalur kereta sepanjang 199,6 kilometer spoor, yang diharapkan akan membuka akses ekonomi yang lebih luas.

“Selain itu, pemerintah juga fokus dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya sebanyak 210,5 ribu unit,” jelas Presiden Joko Widodo. ■

(si,mp), Foto: Andri/hr

Komisi XI Dorong Pembangunan Infrastruktur Mentawai

Berdasarkan data indikator makro ekonomi, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Komisi XI DPR RI mendorong dan mengajak Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk bersama-sama memikirkan pembangunan infrastruktur Mentawai.

“Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur Mentawai bisa cepat masuk ke daerah yang modern tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahannya,” ungkap Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI Marwan Cik Asan saat pertemuan dengan Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Keuangan di Kantor BI Padang, Sumatera Barat, Selasa (22/8).

Politisi dari Fraksi Demokrat ini menyatakan, bahwa kunci dari

pembangunan adalah infrastruktur jalan. “Jalan darat Trans Mentawai sepanjang 360 km dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 3,8 triliun untuk progres yang sangat signifikan,” katanya.

Bank Indonesia sebuah lembaga negara, lanjutnya, memiliki *resources* yang cukup besar baik dari sisi anggaran maupun dari sisi potensi sumber daya manusia. “Kehadiran BI di daerah tidak hanya sekedar untuk mengendalikan membantu pemerintahan daerah dan mengendalikan inflasi tapi diharapkan BI bisa memberikan input yang strategis bagi

pemerintah daerah agar bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur mentawai,” ungkap Marwan.

Menanggapi hal tersebut di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan telah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai baik di tingkat provinsi maupun pusat. Bahkan data hasil belasan kali kunjungan langsung ke Mentawai telah dilaporkan ke pemerintah pusat. “Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai,” katanya.

Pernyataan Nasrul Abit tersebut, langsung dijawab oleh Marwan, bahwa komitmen DPR sebagai wakil rakyat mewakili rakyat seluruh Indonesia salah satunya Kabupaten Mentawai. “Kami akan memperjuangkan ini agar segera terealisasi”, tutup Marwan. ■

(Relief/sc), Foto: Arrel/hr



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR dengan BI, Bappenas dan Kemenkeu di Kantor BI Padang



Tim Kunspek Komisi XI DPR berfoto bersama jajaran BI, OJK, BNI dan BTN di Bali

DPR Apresiasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Bali

Komisi XI DPR RI mengapresiasi perekonomian di Pulau Dewata Bali yang memiliki angka di atas perekonomian nasional yaitu 5,87% pada Triwulan II tahun 2017, angka ini cukup tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang hanya 5,01%. Perekonomian Provinsi Bali dinilai sangat baik, hal ini terbukti dari banyaknya transaksi tunai dan non-tunai pada sektor pariwisata.

Meskipun perekonomian naik diatas rata-rata nasional, namun masih ada beberapa kendala dalam pengendalian Inflasi oleh kelompok *volatile food* di Propinsi Bali. Ungkap anggota Komisi IX DPR Heri Gunawan dalam pertemuan dengan Bank Indonesia, OJK, Bank BNI, dan Bank BTN di Bali, Senin (21/8).

Salah satu kendala pengendalian inflasi yaitu adanya alih fungsi lahan. Dahulu ada pertanian di Bali yang terkenal bernama subak, sekarang lahan tersebut alih fungsi menjadi tempat pariwisata sementara kebutuhan pangan makin hari makin bertambah. "Alih fungsi lahan pertanian ke pariwisata musti diwaspadai karena disatu sisi ada kesenjangan atau

ketimpangan," jelas Heri.

Selain kurangnya lahan pertanian, penyediaan tenaga kerja di sektor pertanian juga kurang diminati karena banyak yang beralih ke pariwisata. Sehingga ketergantungan *supply* dari luar Bali sangat besar dan menyebabkan harga bergejolak. Rantai pemasaran distribusi yang relatif panjang dan akses jalan yang kurang mendukung juga menjadi kendala dalam *supply* bahan baku dari luar Bali.

Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Regional 3 Bank Indonesia Firmanzah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah untuk melakukan pengendalian inflasi di Provinsi Bali seperti pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di

seluruh kabupaten dan kota.

"Saat ini Provinsi Bali telah dibentuk TPID di seluruh kabupaten dan kota yaitu terdiri dari 1 TPID Propinsi Bali dan 9 TPID kabupaten dan kota, selain itu Pimpinan Daerah Bali juga telah menandatangani komitmen untuk sepakat mengarahkan segala daya upaya sesuai tugas dan wewenang untuk mengendalikan inflasi tersebut " jelas Firmanzah.

Ke depan TPID Provinsi Bali diharapkan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi maupun melalui SKPD terkait." Kebijakan musti dibatasi dan harus ada sinergi dari pihak BI, OJK dan TPID aktif melakukan rapat teknis sehingga dapat memperbaiki Provinsi Bali ke depannya," tutur Heri. ■

(Jay), Foto: Jayadi/hr

IDN Minta RUU Dwi Kewarganegaraan Jadi RUU Prioritas

Kecintaan terhadap Indonesia menghantarkan Task Force Dwi Kewarganegaraan Indonesia Diaspora Network (IDN) berkunjung ke Gedung DPR menemui Kepala Badan Keahlian (BK DPR) meminta untuk segera mengakomodasi RUU Dwi Kewarganegaraan.



Suasana pertemuan Kepala BKD, Johnson Rajagukguk dengan Task Force Dwi Kewarganegaraan Indonesia Diaspora Network (IDN) di Gedung DPR.

“Tujuan mereka datang kesini mendorong agar RUU Dwi kewarganegaraan masuk dalam pembahasan prioritas. Supaya para diaspora yang tengah berstatus WNA, yang belum memiliki warga negara dapat diberi kepastian, salah satunya melalui kebijakan,” jelas Kepala BKD Johnson Rajagukguk usai menerima Ketua Task Force Dwi Kewarganegaraan IDN Renny Damayanti Mallon di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Dijelaskan Johnson, beberapa tahun terakhir memang BK DPR sudah menyusun naskah akademik, karena Komisi III meminta kepada BK DPR untuk membuat konsep naskah akademik. “DPR sudah memasukkan perubahan UU Dwi Kewarganegaraan ke dalam legislasi namun memang belum masuk prioritas,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, akan mendorong RUU Dwi Kewarganegaraan masuk ke dalam prioritas, sebab jika dilihat dari sisi ekonomi, ini akan menjadi salah satu sumber keuntungan bagi Indonesia, karena para diaspora mempunyai potensi untuk berperan di bidang ekonomi.

“Kita berharap memang ada peran nyata dari mereka, namun memang terkendala kebijakan. Masalah Dwi Kewarganegaraan memang perlu diskusi secara mendalam, karena jika memang disahkan kita tidak mau salah memberikan status dwi kewarganegaraan, harus betul-betul selektif dalam memberikan status dwi kewarganegaraan, persyaratannya perlu kita atur,” tuturnya.

Sebelumnya Reni Damayanti Mallon menjelaskan, pihaknya ingin meluruskan

banyaknya masyarakat yang salah paham bahwa IDN mengajukan Dwi Kewarganegaraan untuk orang asing “Kami mengajukan Dwi Kewarganegaraan bukan untuk orang asing, tetapi untuk keturunan warga negara Indonesia dan ex WNI, tidak untuk semua orang, masyarakat banyak salah memahami, kita ingin luruskan di sini,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini migrasi merupakan faktor penting dalam pembangunan global pasca *Millennium Development Goals 2015*. Peran diaspora sebagai non-state dalam Hubungan Internasional dan sebagai agen perubahan di tanah air dapat dimaksimalkan apabila disediakan ruang dan dikelola secara efektif

Diaspora tidak hanya membawa remitasi, tetapi juga membawa aset dalam bentuk hukum *capital, skill, wealth* dan *networks*. 56 negara di dunia sudah menyesuaikan kebijakan imigrasi dan kewarganegaraan untuk mengakomodasi Diaspora. 44 negara telah menerapkan dwi kewarganegaraan dalam konteks seseorang tidak kehilangan warga negara asalnya jika ia mengambil kewarganegaraan lain.

“Namun Indonesia belum mempunyai kebijakan efektif dalam mengelola Diaspora. DPR sudah mengajukan usulan mengamandemen UU Kewarganegaraan no 12 tahun 2006 dengan maksud mengakomodasi Diaspora, membuka peluang dwi kewarganegaraan bagi diaspora dan mendapuk potensi diaspora untuk pembangunan nasional Indonesia. Kami Harap RUU ini bisa masuk prioritas,” pungkasnya. ■



“Sudah tiga tahun ini DPR mengadakan lomba panjat bambu betung. DPR mentradisikan panjat Bambu Betung bukan Panjat Pinang, karena bambu adalah tanaman khas Indonesia dan ada dimana-mana,” jelas Djuned.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Bambu Betung yang disediakan untuk perlombaan ada 72 buah, jumlah

(ria.mpi), Foto: Aris/ih

Panjat Bambu Betung Tradisi Pesta Rakyat di DPR



Sekjen DPR RI Achmad Djuned memberikan laporan acara Pesta Rakyat 2017

Untuk ketiga kalinya, DPR menggelar Pesta Rakyat, Kamis (18/8) berupa lomba Panjat Bambu Betung. Lomba tradisional pengganti panjat pinang ini merupakan tradisi yang paling ditunggu masyarakat. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned usai melakukan senam bersama dengan karyawan dan masyarakat di Komplek DPR.

sesuai dengan usia kemerdekaan RI yang ke-72. Mengenai alasan mengapa dalam pesta rakyat selalu diadakan perlombaan panjat bambu, karena ada hikmah yang bisa diambil dalam panjat bambu ada kebersamaan.

“Ini merupakan sebuah tradisi bangsa Indonesia, bahwa kita adalah masyarakat yang mengindahkan gotong

royong,”ungkapnya. Kedua, lanjut dia, bambu betungnya diluimuri minyak, sehingga untuk memperebutkan hadiah memerlukan sebuah perjuangan keras. “Jadi hadiah yang tergantung di atas adalah apa yang dicita-citakan bagi peserta. Dalam memperoleh cita-cita membutuhkan kerja keras, kerja sama dan kerja cerdas,” tandasnya.

Filosofi yang diambil dari panjat bambu lanjut Djuned adalah kerjasama, keuletan dan strategi. Adapun pesertanya yang turut memeriahkan pesta rakyat tidak hanya dari kalangan yang ada di Sekretariat DPR/MPPR/DPD tetapi juga masyarakat luas.

“Pesta Rakyat ini memang kami adakan untuk semua masyarakat, untuk menyatukan rakyat dengan lembaga DPR. Nantinya satu bambu itu akan dipanjat oleh empat orang peserta dalam satu kelompok, sehingga total yang mengikuti panjat bambu betung ini ada 288 orang peserta,”pungkasnya.■

Diversifikasi Energi Pada Nota Keuangan 2018 Sulit Diharapkan

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar pesimis dengan arah pengembangan diversifikasi energi nasional yang disampaikan dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.

“Nota Keuangan APBN 2018 semakin menegaskan bahwa proyeksi lifting minyak terus mengalami penurunan sejak tahun 2015. Situasi ini memberikan gambaran tidak adanya terobosan terhadap peningkatan produksi dan kelemahan dalam melakukan diversifikasi energi secara nasional,” ujar Rofi Munawar dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, (22/8).

Rofi juga menjelaskan realisasi perkembangan lifting minyak di APBN sejak tahun 2016. Di tahun tersebut lifting minyak Indonesia mencapai 825 barel per hari (bph), mengalami penurunan di APBN P tahun 2017 sebesar 815 bph dan hingga pada akhirnya di tahun 2018 pemerintah hanya mematok optimis di angka 800 bph.

Situasi berbeda terjadi pada lifting gas yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1.193 bph, tahun 2017 sebesar 1.150 dan tahun 2018 sebesar 1.200 bph. Disisi lain, perkembangan diversifikasi energi juga tidak banyak berubah, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konfigurasi bauran

energi (energy mix) yang masih didominasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 33,8 persen, gas 23,9 persen, batubara 34,6 persen dan 7,7 persen berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Postur APBN tahun 2018 jika dicermati sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa diversifikasi energi tidak banyak mengalami perubahan, masih dominannya penggunaan minyak dan batubara dalam bauran energi nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa belum adanya keseriusan dalam mengembangkan alternatif energi yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang (sustainable),” ucap politisi F-PKS itu.

Subsidi energi yang semakin besar di tahun 2018 sekitar Rp 172,407,9 triliun harus diorientasikan kepada sektor publik secara transparan, efektif dan tepat sasaran, lanjutnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi daya pendorong konsumsi energi publik yang semakin produktif. Sebagai informasi, angka subsidi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 168.876,8 triliun rupiah.

“Kenaikan subsidi energi harus



Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar

diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan mampu mendorong produktivitas nasional, bukan sekedar program populis yang tidak memberikan dampak yang besar kepada perbaikan konsumsi publik.” tandasnya.

Sebagai catatan, dalam APBN pemerintah di tahun 2017 telah menetapkan lifting minyak bumi sebesar 815 bph dan lifting gas bumi 1.150 ribu bph dengan total lifting migas sebesar 1.965 ribu bph. Tentu saja secara faktual, target tersebut tidak jauh berbeda dengan proyeksi APBN 2018 lifting minyak 771 – 815 bph dan 1.194-1.235 bph. ■

(dep/sc), Foto: Jakarta/hr

Proses Pengadaan Helikopter AW 101 Sudah Sesuai Prosedur

Dalam kasus dugaan korupsi Helikopter AW 101 dengan nilai proyek pengadaan senilai Rp 738 miliar, diperkirakan terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 220 miliar akibat adanya penyimpangan.

Terkait persoalan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menyatakan bahwa dalam kasus Helikopter AW 101, prosedur pengadaannya sudah benar, hanya saja terjadi masalah selisih harga.

“Kalau prosedurnya tidak benar tidak akan mungkin ada disini pesawat itu. Kalau saya baca keterangan dari

Danpuspom dan Panglima TNI, disitu terjadi selisih harga. Hal itulah yang menjadi masalah,” ucap Supiadin dalam acara Forum Legislasi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/08).

Ia menegaskan bahwa kasus korupsi yang terjadi tersebut diluar sepengetahuan Komisi I DPR. Menurutnya, bila terjadi pelanggaran seperti itu, maka permasalahan tersebut seharusnya dikembalikan kepada Menhan sebagai pihak yang memberikan persetujuan.

“Pengadaan alutsista itu tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Pengadaan alutsista melalui sebuah



sistem, usulannya selalu dari tingkat bawah berdasarkan usulan user. Dalam proses itu Komisi I DPR tidak pernah ikut campur,” tandasnya.

Komisi I DPR RI hanya tahu usulan anggaran dari TNI ataupun Departemen Pertahanan tentang kebutuhan sejumlah alutsista, lanjutnya. Pihak Dephan dan Kepala Staf Angkatan terkait yang melakukan kontrak kerja dengan para kontraktor.

“Untuk mengetahuinya, Komisi I DPR membentuk Panja Alutsista, yang tugasnya antara lain untuk melakukan pengecekan dilapangan alutsista yang sudah dibeli. Dari situlah kita akan menemukan temuan-temuan, yang kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah melalui rapat kerja dengan Menhan, panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan,” jelas Supiadin.

“Kita tidak tahu harganya berapa, akan dibeli dinegara mana, dan segala macamnya. TNI dan Dephan yang mengatur itu. Dephan merupakan penentu kebijakan dibidang pertahanan, namun usulan-usulan tetap datangnya dari bawah. Ada yang pembelianya melalui kredit ekspor atau



Anggota Komisi I DPR RI, Supiadin dalam acara Forum Legislasi

langsung dari APBN, tergantung berapa besarnya harga,” tambahnya.

Supiadin menyampaikan, Panja Alutsista Komisi I DPR biasanya akan meninjau ke pabriknya. Panja juga ingin mengetahui apakah pembelian dengan dana yang ada itu mampu membeli sebuah senjata dengan sistem yang lengkap.

“Menyangkut kasus-kasus dilapangan, hal itu diluar sepengetahuan dari Komisi I DPR. Seperti pada kasus helikopter AW, setelah terjadi barulah kita telusuri, dimana letak kesalahannya hingga sampai terjadi kasus seperti ini. Saya berharap persoalan ini tidak membawa efek kepada disintegrasi TNI,” pungkasnya. ■

(dep.mp), Foto: Runt/hr

DPR Pastikan Revisi UU KPK

DPR memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan setelah adanya temuan Pansus Hak Angket KPK DPR terkait penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh penyidik KPK.

“Saya meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus. Sebab, revisi UU KPK itu sudah pasti, karena penyimpangannya sudah terlalu banyak. Kelihatan secara kasat mata,” tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Fahri menilai kinerja KPK sudah seperti negara dalam negara, karena tidak memiliki ketundukan pada prosedur bernegara yang sudah baku. Baik dalam hukum acara, penegakan hukum maupun terkait hak-hak warga negara.

Untuk itu, ia meminta pemerintah

menyiapkan antisipasi untuk mengintegrasikan kembali KPK dalam sistem peradilan pidana. KPK juga terus-menerus berupaya secara moral lebih tinggi daripada lembaga-lembaga lain.

Seperti dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Padahal, kata Fahri kasus tersebut tak berkaitan dengan hakim.

“Itu urusannya dengan panitera. Dan, panitera bukan pengambil keputusan. Tukang catat saja sebetulnya. Tapi itu dikembangkan, sepertinya KPK mau mengatakan ‘hai di tempat anda ada maling’,” analisa Fahri.



Wakil Ketua DPR Korkesra, Fahri Hamzah

Dengan demikian revisi UU KPK dimungkinkan, karena legislasi merupakan tugas DPR dan pemerintah. Tapi, “Tidak akan terjadi revisi UU kalau salah satu dari keduanya tidak menyetujui,” imbuh politisi asal dapil NTB itu. ■

(sl/sc), Foto: Runt/hr



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo

DPR Desak PM Malaysia Minta Maaf Soal Insiden Bendera Terbalik

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah Malaysia untuk segera memberikan peringatan keras kepada penyelenggara SEA Games 2017 terkait insiden bendera Indonesia terbalik. Kendati pemerintah Malaysia melalui menternya sudah meminta maaf kepada Indonesia.

“Permintaan maaf tidak sekedar dilakukan seorang menteri. Perdana Menteri Malaysia juga harus menyampaikan permohonan maaf secara resmi,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu dalam keterangan pers yang diterima Parleментарia, Senin (21/8).

Pasalnya, tambah politisi asal dapil Jawa Tengah itu, karena ini forum internasional yang melibatkan bangsa dan negara, maka pemerintah Malaysia juga harus menindak tegas kepada penanggung jawab penyelenggara SEA Games 2017.

Sebagaimana diketahui, insiden bendera Indonesia terbalik menjadi viral setelah diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi, di akun Twitter-nya. Imam mengunggah foto buku panduan SEA Games 2017 yang memperlihatkan bendera Indonesia menjadi berwarna putih merah, yang seharusnya merah putih.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyangkan insiden terbaliknya bendera Indonesia di buku panduan SEA Games 2017 Malaysia. Retno mengatakan Indonesia telah mengambil langkah resmi dengan mengirimkan nota diplomatik ke Malaysia.

Insiden ini membuat masyarakat Indonesia kecewa kepada Malaysia selaku tuan rumah SEA Games 2017. Pasalnya mereka bukan pertama kalinya menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. ■

(s/s), Foto: Oj/1hr

Komisi I Minta Malaysia Segera Investigasi Bendera Indonesia Terbalik

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari sangat menyesalkan kejadian bendera Indonesia yang tercetak terbalik dalam buku SEA Games 2017 di Malaysia. Menurutnya, kejadian dalam cetakan buku panduan SEA Games 2017 itu adalah kesalahan fatal. Untuk itu, pihaknya meminta Malaysia segera menginvestigasi insiden itu.

“Kita minta Malaysia segera melaksanakan investigasi mendalam dan disampaikan ke publik siapa dan mengapa sampai terjadi kesalahan fatal di ajang internasional yang sudah berkali-kali kita lakukan bersama,” ujar Kharis dalam keterangan tertulis kepada Parleментарia, Senin (21/8).

Kharis menambahkan, investigasi itu menjadi hal yang penting, dan bukan hanya sekedar permintaan maaf saja. “Memang pemerintah kita masih menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia. Menpora Malaysia juga sudah minta maaf, tapi semua harus dibuka ke publik agar hal ini jelas kesengajaan atau bukan,” tegas Kharis.

Penjelasan di sejumlah media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah melayangkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia mengenai hal ini.

“Kita semua, pemerintah, DPR dan masyarakat amat kecewa kok bisa itu terjadi. Kita minta semua yang salah ditarik dan diperbaiki,” tegas politisi PKS itu.

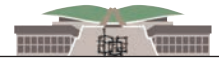
Namun di sisi lain, Kharis meminta masyarakat jangan bereaksi berlebihan dalam menyikapinya, dan bersikap tenang. Ia meminta seluruh lapisan masyarakat semua menunggu langkah serius Malaysia menuntaskan masalah ini dan tetap fokus mendukung kesuksesan timnas Indonesia di SEA Games.

“Kita percayakan langkah diplomasinya kepada Menlu Retno Marsudi untuk menindaklanjuti pembicaraannya dengan Menlu Malaysia serta kita tunggu jawaban nota diplomatik yang sudah dikirim oleh KBRI Kuala Lumpur,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(s/s), Foto: Jayadi/hr



Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari



Ruang Kerja Tak Layak Pembangunan Gedung Baru DPR adalah Kebutuhan

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Capt. Anthon Sihombing mengatakan rencana pembangunan gedung baru DPR dilakukan untuk menunjang kinerja dewan karena saat ini Gedung Nusantara I yang menjadi tempat bagi 560 ruang anggota dewan sudah tidak layak pakai karena over kapasitas.

Karenanya, hari ini, Jumat, (18/8), Anthon mengunjungi kantor BPK dan MK untuk membandingkan situasi lingkungan kerja lembaga tinggi negara. Ruang kerja di kedua lembaga tersebut sangat berbeda dengan kondisi ruang kerja anggota DPR.

Di MK misalnya, satu lantai secara khusus diisi oleh 3 hakim anggota yang dibantu oleh 2 peneliti dan 2 sekretaris administrasi. Kondisi ruang kerja yang layak tersebut sangat berbeda dengan ruang kerja anggota DPR yang memiliki total 7 staf untuk setiap 1 anggota DPR.

"Kita ingin bandingkan dengan di DPR. Di DPR, ruangnya sudah tidak memadai karena over kapasitas. Gedung

itu dibangun dulu untuk maksimal 800 orang. Tapi sekarang yang mengunjungi DPR mencapai 5 ribu orang tiap hari," ujar Anthon usai meninjau ruang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil uji kelayakan yang dilakukan Kementerian PUPR juga telah menyebutkan bahwa gedung DPR sudah tidak layak pakai dengan ditandainya adanya pergeseran dan retak. "Hasil assesment yang dilakukan PUPR pun menyebutkan bahwa ada pergeseran dan retak. Kita meminta gedung baru itu adalah kebutuhan yang relias, bukan mengadagada, Karena kita ingin anggota DPR nyaman bekerja di ruang kerjanya," tutur Anthon.

Nantinya, rencana pembangunan

gedung baru ini adalah multiyears karena akan memakan waktu yang cukup panjang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembangunan gedung baru ini bukan untuk kepentingan anggota DPR periode 2014-2019 saja, namun untuk kepentingan anggota DPR periode selanjutnya.

"Walaupun anggota DPR adalah lembaga politik. Wajar sebagai BURT untuk memikirkan kepentingan seluruh anggota dewan. Karena anggota itu maunya nyaman kerja di ruangan, menerima tamu di ruang kerjanya," sambungnya.

Sekjen DPR Ahmad Djuned yang turut mendampingi mengatakan bahwa awalnya akan melakukan penataan kawasan terlebih dahulu. Masa pembangunan gedung ini pun juga akan multi years, tidak mungkin akan selesai pada anggota DPR periode 2014-2019.

"Rencananya, pembangunan ini multi years dan tidak akan selesai pada periode ini. Jadi bangunan itu seandainya nanti sesuai perencanaan juga untuk anggota DPR periode selanjutnya," tutur Djuned. ■

(rs), Foto: Jayadi/hr



Ketua BURT DPR RI, Anthon Sihombing didampingi Sekjen DPR Achmad Djuned meninjau sarana dan prasarana kantor BPK dan MK,



Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah sebagai inspektur upacara peringatan 17 agustus 2017 di lingkungan Setjen, MPR, DPR, dan DPD RI, Komplek Parleman, Kamis (17/8/2017), foto : eka hindra/hr

Pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR dengan BI, BNI, OJK, BTN Cabang Bali terkait pengawasan mata uang rupiah di Prov. Bali, Senin (22/8) Foto : Jay



Politisi F- Gerindra G. Budi Satrio Djiwandono dan politisi F- Demokrat Putu Supadma Rudana dilantik menjadi Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2014-2019, Kamis (24/8).Foto: Jaka,Arief